

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia yang juga merupakan salah satu negara berkembang. Jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 275 juta jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk yang besar merupakan sebuah modal dalam melakukan pembangunan nasional. Namun, apabila pengelolaan dalam jumlah penduduk tersebut tidak tepat dapat menimbulkan masalah, salah satunya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Sementara, jika Indonesia dapat mengelola jumlah penduduknya dengan baik maka akan semakin mudah dalam mencapai pembangunan nasional. Permasalahan mengenai ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kesempatan kerja.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar, potensi angkatan kerja juga sangat tinggi. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat setiap tahunnya juga diiringi dengan peningkatan angkatan kerja. Dengan kata lain, pasokan tenaga kerja di pasar tenaga kerja turut serta meningkat. Namun peningkatan ketersediaan lapangan kerja akibat bertambahnya angkatan kerja tidak serta merta menyebabkan terciptanya lapangan kerja baru, sehingga angkatan kerja baru tersebut dapat memasuki pasar tenaga kerja. Kontradiksi antara peningkatan angkatan kerja dengan terciptanya lowongan kerja akan menimbulkan angka tunakarya. Maka dari itu,

diperlukan strategi pembangunan untuk membuat lapangan kerja yang luas seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 1.1 Data Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan di Indonesia 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja	Bekerja	TPT
2018	264.161.600	131.005.641	124.004.950	5,3%
2019	266.911.900	133.560.880	126.515.119	5,23%
2020	270.203.900	138.221.938	128.454.184	7,07%
2021	272.682.500	140.152.575	131.050.523	6,49%
2022	275.773.800	143.722.644	135.296.713	5,86%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Karena angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian, data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Tidak diterimanya seluruh angkatan kerja disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang terbatas, karena indikator penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih cukup rendah. Tingkat pengangguran dapat meningkat saat pasokan tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja rendah. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan merupakan salah satu indikator tingginya pengangguran (Yusuf et al., 2019).

Pulau Jawa terus menjadi tujuan utama para pekerja dari berbagai daerah untuk bekerja di pulau tersebut, perbandingan upah di Pulau Jawa lebih besar dengan pulau lainnya menjadi salah satu alasan.. Selain menjadi pusat ekonomi, pertumbuhan di pulau-pulau lainnya. Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian nasional, di mana pada tahun 2021 Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,89 persen bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Primadhyta, 2022). Naik atau turunnya perekonomian dapat dipengaruhi oleh seberapa banyak tenaga kerja yang terserap dalam suatu perekonomian. Perekonomian

dapat mencapai output potensial ketika banyak tenaga kerja yang terserap (Meilianna, 2020).

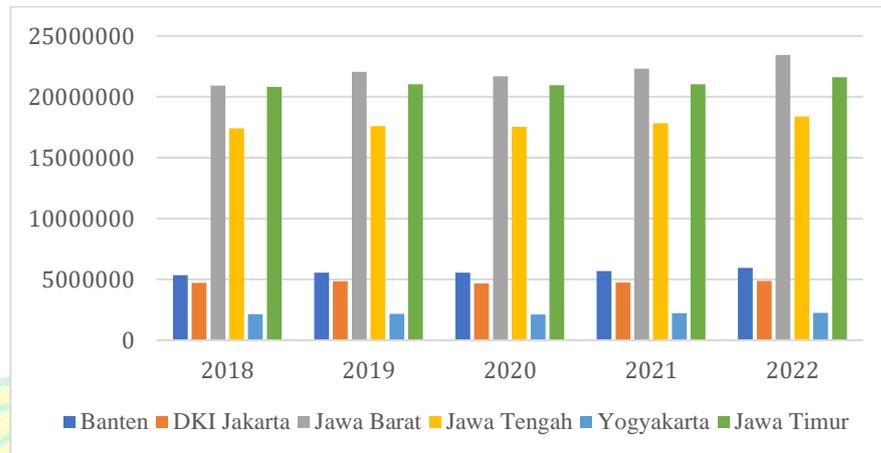
Indikator makroekonomi digambarkan dalam pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan keadaan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat mempercepat perkembangan perekonomian daerah baik secara regional maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi salah satunya ialah mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja (Basnett & Sen, 2013).

Berdasarkan laporan dari Bank Dunia dan IFC (2012) di mana terdapat beberapa hambatan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, seperti kurangnya tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang buruk dan kerangka kebijakan yang berbelit-belit. Selain itu rendahnya penyerapan tenaga kerja juga disebabkan karena *link and match* (keterkaitan dan kecocokan) antara dunia pendidikan dan dunia usaha yang belum dapat berjalan baik dan permasalahan lainnya (Wijayanto et al., 2019). Banyaknya permasalahan maupun hambatan yang terjadi ketika terserapnya tenaga kerja menjadikan penyerapan tenaga kerja tidak maksimal.

Perhatian utama pada setiap negara di dunia khususnya di negara yang sedang berkembang adalah masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengangguran. Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh setiap negara tujuannya ialah untuk menekan angka pengangguran. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi harus dibarengi dengan banyaknya lapangan pekerjaan

baru yang dapat menyerap banyaknya angkatan kerja sehingga ini bisa menekan jumlah pengangguran. Perluasan penyerapan tenaga kerja sangat penting dilakukan untuk merespons laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Pada Agustus 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat sebanyak 143,72 juta jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 68,63% dari total penduduk usia kerja. Namun banyaknya angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia.

Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian yang memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi dibandingkan pulau lainnya. Pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa sebesar 81,9 juta jiwa atau sekitar 57% dari total angkatan kerja di Indonesia. Pertambahan populasi Indonesia yang setiap tahunnya selalu meningkat menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yaitu banyaknya angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga munculnya pengangguran yang kemudian menjadi penghambat dalam pembangunan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Maka dari itu setiap masyarakat Indonesia memiliki kesempatan dalam bekerja, namun tidak didukung dengan lapangan kerja yang ada.



Gambar 1. 1 Data Angkatan Kerja di Pulau Jawa 2018-2022

Sumber : Data BPS yang diolah oleh peneliti

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yakni usia 15 hingga 64 tahun yang sedang bekerja maupun sedang dalam mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat kita lihat dari diagram di atas bahwa jumlah angkatan kerja tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Barat, jumlahnya pada tahun 2021 sebesar 24.743.628 jiwa dan sudah mengalami kenaikan 30,9% sejak 2010. Selanjutnya jumlah angkatan kerja terendah di Pulau Jawa terdapat di Provinsi DI Yogyakarta, jumlahnya pada tahun 2021 sebesar 2.334.995 jiwa dan sudah mengalami kenaikan 24% sejak 2010.

Jumlah angkatan kerja yang begitu tinggi disebabkan karena adanya bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk usia kerja atau produktif dibandingkan usia non produktif yang dapat membantu percepatan pembangunan suatu wilayah. Saat ini potensi bonus demografi yang ada masih belum dapat dimaksimalkan, hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa jumlah pengangguran masih di dominasi

oleh pemuda. Selanjutnya bonus demografi ini dapat menjadi sebuah tantangan, di mana ketika jumlah penduduk yang bertambah tidak dibarengi dengan kesuksesan pembangunan, maka penduduk tersebut dapat menjadi beban pembangunan. Perlu dilakukan upaya yang dapat memperluas penyerapan tenaga kerja agar pertumbuhan penduduk usia produktif seimbang dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan (Lokiman et al., 2014).

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh kesempatan kerja. Data dibawah menunjukkan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu tahun 2015-2022. Berdasarkan data dibawah kita dapat melihat bahwa penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya pada setiap provinsi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang bekerja tertinggi yakni sebesar 23.452.568. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang bekerja terendah yakni sebesar 2.241.131. Berdasarkan data diatas pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja di seluruh Pulau Jawa yakni sebesar 77.513.173. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa yakni sebesar 81.974.223 atau sebanyak 94% rasio orang yang bekerja dibandingkan angkatan kerja.



Gambar 1. 2 Data Jumlah Penduduk yang Bekerja di Pulau Jawa Tahun 2018-2022

Sumber : Data BPS yang diolah oleh peneliti

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan penelitian terhadap penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan. Alasan utama penelitian ini perlu dilakukan ialah mengingat jumlah penduduk di Indonesia terutama di Pulau Jawa yang jumlahnya sangat banyak. Sementara itu, masalah ketenagakerjaan yang selalu muncul yaitu jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia jumlahnya terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Beberapa provinsi di Pulau Jawa juga masuk ke dalam provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia, diantaranya yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta (CNN Indonesia, 2022). Selain itu jumlah upah minimum provinsi (UMP) di Pulau Jawa juga tidak merata nilainya. Selanjutnya peneliti juga melihat adanya *research gap* berupa inkonsistensi penelitian sebelumnya di mana ada yang mengatakan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, namun di penelitian lain ada yang mengatakan berpengaruh positif.



Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional 5 Tahun

Terakhir

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat melihat bahwa Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai yang tidak merata. Upah minimum provinsi di Pulau Jawa nilainya masih cukup rendah dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau lain, kecuali DKI Jakarta. Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta nilainya mencapai Rp4.641.854 yang mana menjadi paling tertinggi. Sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah di Pulau Jawa yakni nilainya mencapai Rp1.810.351. Bahkan, keempat provinsi di Pulau Jawa yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menjadi empat provinsi dengan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia. Bahkan, nilai upah keempat provinsi tersebut dibawah rata-rata upah nasional.

Tinggi atau rendahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat upah minimum yang berlaku. Setiap tahunnya upah minimum mengalami kenaikan, yang mana ini dapat memicu angkatan kerja untuk ikut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Kenaikan upah minimum dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari pekerja dan

pengusaha. Kenaikan upah minimum berdampak bagi pekerja di mana ini dapat meningkatkan pendapatan mereka serta daya beli mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat mereka dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Menurut Atiyatna et al. (2016) dampak dari adanya kenaikan upah minimum ini, cenderung membuat pengusaha untuk mengambil keputusan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerjanya.

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi tenaga kerja diantaranya meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, dan pengeluaran non upah. Sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat inflasi, pengangguran, tingkat bunga, dan pengeluaran pemerintah (Jagaditha & Yasa, 2019). Pada penelitian ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tenaga kerja yaitu jumlah upah minimum provinsi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah upah minimum provinsi. Upah merupakan salah satu bagian yang penting dalam biaya produksi di mana ini merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Tinggi atau rendahnya tingkat upah akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha sehingga tingkat upah dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Jika upah mengalami kenaikan sedangkan harga input lain tetap, maka pengusaha akan cenderung

mengurangi jumlah pekerja karena harga dari tenaga kerja lebih mahal jika dibandingkan dengan input lain untuk mempertahankan keuntungan.

Kenaikan tingkat upah juga dapat menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat sehingga menyebabkan harga per unit barang menjadi lebih mahal, sehingga membuat konsumen akan mengurangi jumlah pembelian barang tersebut. Akibat naiknya harga barang membuat penjualan menjadi berkurang dan perusahaan akan menurunkan jumlah produksi atas barang tersebut dikarenakan banyak barang yang tidak terjual. Menurunnya jumlah produksi akan mengakibatkan jumlah permintaan tenaga kerja mengalami penurunan (Sumarsono, 2003). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya & Kholilah (2020) yang mengatakan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di mana ketika upah mengalami kenaikan maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan mengalami penurunan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi pada suatu perekonomian dapat menyebabkan perubahan pada output, kesempatan kerja, dan pada akhirnya dapat menimbulkan pengangguran (Warapsari et al., 2020). Namun apabila inflasi yang terjadi dalam suatu perekonomian masih tergolong ringan, perusahaan akan berusaha untuk menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tertentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja.

Kondisi sebelumnya membuat permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan akhirnya mendorong laju perekonomian melalui pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (*hyperinflation*) maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja dan pengangguran bertambah (Nanga, 2005). Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Hasibuan et al., (2019) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain upah dan inflasi, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Salah satu indikator keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan kesempatan kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Agar permasalahan mengenai ketengakerjaan di suatu daerah dapat terselesaikan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan output dari pembangunan daerah.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dapat menekan angka pengangguran. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali et al., (2020) yang mengatakan bahwa peningkatan nilai PDRB menandakan jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk

menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi, sehingga penyerapan tenaga kerja bertambah. Dengan demikian peneliti ingin melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan **“Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2011-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di latar belakang peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?
3. Apakah terdapat pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

3. Untuk mengetahui produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pemerintah terutama dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan sebagai pengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama dari sisi upah minimum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

